

Harga Minyak Dekati US\$100 per Barel:

# MENEPUK MINYAK DI DULANG

**A**KHIRNYA, setelah harga minyak dunia terus melonjak tajam mendekati level US\$100 per barel, pemerintah tak mampu lagi mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di dalam negeri. Mulai awal November lalu misalnya, PT Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi untuk industri rata-rata 5% atau berkisar 2,9-6,4%. Harga premium misalnya, naik 3,4%, minyak tanah naik 3,4%, minyak solar naik 3,7%, minyak Diesel naik 2,9%, dan minyak bakar naik 6,4%. Tak cukup sampai disitu, tren pergerakan harga minyak di pasar internasional yang terus merangkak akhirnya memaksa PT. Pertamina mempersempit penyesuaian harga BBM untuk industri dari per satu bulan menjadi dua minggu. Buntutnya, mulai 15 November 2007 harga BBM industri kembali melonjak rata-rata 10% dibandingkan harga yang ditetapkan per 1 November 2007. Dengan kata lain, dalam waktu hanya dua pekan saja — sejak awal November 2007 — harga BBM industri melonjak rata-rata 15%!

Langkah Pertamina ini jelas mengejutkan dunia industri. Bukan apa-apa, sebelumnya PT Pertamina mengaku memperoleh keuntungan sebesar Rp500 miliar dari kenaikan harga minyak US\$1 per barel, walaupun mengatakan masih terus mengkaji dampaknya terhadap keuangan perusahaan. Artinya, bila dihitung dengan harga rata-rata minyak dunia hingga Oktober lalu saja yang mencapai US\$ 70 per barel — sementara patokan harga minyak yang digunakan pemerintah dalam perhitungan subsidi sebesar US\$ 60 per barel,

maka Pertamina dipastikan mendapat keuntungan sekitar Rp5 triliun. Jadi bisa dibayangkan kenaikan keuntungan yang bisa diperoleh ketika harga minyak dunia mendekati US\$100 per barel. "Perhitungan kasarnya, setiap kenaikan US\$1 kita mendapat untung Rp500 miliar," ungkap Kepala Divisi Komunikasi Pertamina Wisnuntoro tak lama setelah harga minyak mulai melonjak pada Oktober lalu.

Memang, perhitungan 'winfall profit' Pertamina tersebut masih belum final. Soalnya, angka-angka tersebut masih harus dikalikan kembali dengan jumlah hari yang terjadi kenaikan harga minyak. Selanjutnya, hasil perhitungan itu dikurangi subsidi yang diberikan pemerintah untuk tahun 2007 ini sebesar Rp50 triliun. Namun, dengan asumsi kenaikan berlangsung selama dua bulan atau 60 hari saja, maka akan didapat angka keuntungan kotor dari kenaikan harga minyak sebesar Rp300 triliun. Setelah dikurangi subsidi, maka keuntungan Pertamina menjadi sedikitnya Rp250 triliun. Itu baru dari perhitungan BBM bersubsidi, belum termasuk BBM industri. Konsumsi BBM kita per tahunnya sekitar 60 juta KL.

Terlepas dari benar-tidaknya winfall profit yang diperoleh PT. Pertamina dari melonjaknya harga minyak dunia, yang pasti langkah terbaru persero minyak ini langsung membuat kalangan industri kalang-kabut. Sejumlah pengusaha dan asosiasi pengusaha menyambut keputusan Pertamina itu secara reaktif. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi misalnya, mengaku kaget dengan sistem penyesuaian harga baru yang dibuat Pertamina. Perubahan harga

BBM industri, apalagi dalam bentuk kenaikan, hingga dua kali dalam sebulan, menurut Sofjan jelas akan memunculkan ketidakpastian baru bagi dunia usaha. "Dengan cara penyesuaian harga BBM seperti itu, para pelaku usaha bakal sulit menghitung biaya produksi mereka. Ingat, pelaku usaha kan terikat dengan kontrak jual-beli yang tidak dengan gampang bisa diubah-ubah, apalagi tiap dua minggu. Bisa gila kami menghitung biaya produksi jika harga BBM berubah setiap dua minggu," paparnya.

Sofjan mengkhawatirkan kenaikan harga BBM industri itu pada gilirannya akan memaksa kenaikan harga produk, dan buntutnya malah akan menurunkan daya saing di pasar domestik maupun internasional. "Belum lagi *multiplier effect* bagi penjualan listrik PLN yang juga menggunakan bahan bakar dari Pertamina. Cara yang diambil Pertamina ini akan merugikan dunia usaha. Ini sama saja seluruh risiko ketidakpastian dilemparkan untuk ditanggung oleh dunia usaha," ungkapnya.

Keluhan senada juga diungkap Ketua Umum Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma), A Safiun. Ketidakpastian ongkos produksi, katanya, akan menimbulkan ketidakpastian harga jual. "Untuk mengurangi kerugian, buntutnya perusahaan terpaksa berhenti beroperasi," ujar Safiun sembari menambahkan bahwa ongkos BBM untuk industri logam dan mesin saat ini saja mencapai 15% dari total



biaya produksi. Itu belum termasuk biaya transportasi yang juga pasti ikut melonjak karena kenaikan harga BBM.

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Haryanto juga berpendapat sama. Ia mengkhawatirkan kenaikan harga BBM industri sangat rawan memicu terjadinya pengurangan tenaga kerja. Haryanto memberi contoh, saat Pertamina menaikkan harga BBM industri rata-rata 5% sejak awal November lalu, para pengusaha sepatu telah menanggung tambahan ongkos produksi sebesar 30 sen dolar AS per pasang sepatu. Artinya, dengan ambil asumsi total ekspor sepatu rata-rata 12 juta pasang per bulan, maka ada tambahan biaya produksinya sudah US\$3,6 juta. "Bayangkan apa jadinya jika harga BBM tiap dua minggu naik? Saya rasa tak ada pilihan bagi pengusaha sepatu, kecuali mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menutupi beban biaya yang melonjak," ungkapnya sembari menambahkan bahwa jumlah tenaga kerja di industri sepatu saat ini mencapai 300.000 orang.

Apa boleh buat, faktanya industri memang menjadi sektor yang menanggung langsung dampak dari fluktuasi harga minyak dunia yang saat ini berada di atas kisaran US\$90 per barel — dan dipastikan akan terus bertahan hingga berakhirnya kuartal ke empat tahun 2007. Bagaimanapun, tegas ekonom Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati, kenaikan

harga minyak dunia dan penyesuaian harga BBM ke pasar domestik akan memukul industri yang menggunakan minyak untuk produksi. "Dan ini akan menyulitkan mereka, memaksa kalangan industri untuk mengantisipasi. Pelaku industri non-BBM saja yang tidak akan terpengaruh dengan kondisi tersebut," katanya.

Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia, Djimanto, harga minyak di atas US\$85 per barel saja akan menaikkan biaya produksi perusahaan di Indonesia dengan besaran bervariasi dari yang terkecil 5% hingga yang terbesar 17,6%. Pada gilirannya, biaya produksi naik akan memaksa pengusaha menaikkan harga jual ke konsumen. "Karena kenaikan harga minyak berlangsung secara gradual, penyesuaiannya juga demikian," ujarnya.

Sektor-sektor yang mengalami kenaikan ongkos produksi tinggi di antaranya produsen ban, semen, plastik, besi, kaca dan perusahaan penangkapan ikan. "Sektor-sektor ini banyak menggunakan BBM dalam berproduksi," ujar Djimanto. Sementara yang pengaruhnya rendah dialami industri kerajinan (*handicraft*).

Ini juga diakui Ketua Klub Pemasar Elektronik (EMC) Agus Subiantoro. Kenaikan harga minyak mentah dunia yang menyentuh harga di atas US\$90 per barel, kata Agus, akan meningkatkan harga bahan baku produk

elektronik, terutama plastik yang banyak dipakai untuk lemari es. "Dampak kenaikan harga minyak mentah dunia akan mulai terasa bagi industri (elektronik) maupun konsumen dua hingga tiga bulan ke depan," katanya. Oleh karena itu, bila harga minyak mentah terus merangkak naik, maka mulai awal 2008 akan terjadi kenaikan harga barang elektronik yang terutama dipicu oleh kenaikan biaya bahan baku. "Kenaikan harga barang elektronik bisa mencapai sekitar tiga hingga lima persen akibat kenaikan harga bahan baku yang dipicu meningkatnya harga minyak," ujarnya.

Karena itulah ekonom lebih menyarankan para pelaku industri manufaktur atau yang mengandalkan BBM harus mulai mengalihkan bahan bakar yang digunakan. Hal ini dilakukan agar biaya atau *cost* yang ada harus ditekan serendah mungkin untuk menghindari rasionalisasi karyawan. Di samping itu, para pelaku industri diharapkan melirik sumber energi yang ada di Indonesia baik batubara, panas bumi, bioenergi, energi surya dan sebagainya. "Jika terus mengandalkan BBM, pada akhirnya akan terpengaruh secara serius. Namun, kondisi ini harus diikuti kejelasan kebijakan energi dari pemerintah. Pemerintah harus memberikan sejumlah insentif bagi pengembangan sumber energi alternatif," tandasnya.

#### DAMPAK MAKRO

Itu baru dari sisi mikro. Dari sisi makro, kenaikan harga minyak dunia justru akan sangat mengkhawatirkan dalam jangka panjang. Tak terkecuali Indonesia. Beban pemerintah yang hingga kini masih mensubsidi harga BBM tentu akan bertambah dengan kenaikan harga minyak mentah dunia ini. Ini pasti akan berdampak pula pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini, bahkan bukan tak mungkin tahun depan.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S. Goeltom bahkan mengungkapkan kenaikan harga minyak dunia berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2008 sehingga lebih rendah dari proyeksi semula 6,5%. Menurutnya, risiko penurunan pertumbuhan ekonomi akibat kenaikan harga minyak disebabkan penurunan konsumsi swasta sejalan dengan pengaruh penurunan daya beli akibat peningkatan inflasi dan dampak langsung kenaikan harga barang impor. Hal itu juga disebabkan penurunan investasi swasta akibat permintaan domestik yang menurun. "Penurunan permintaan domestik cukup kuat mempengaruhi



penurunan pertumbuhan ekonomi 2008 meski net ekspor meningkat akibat pertumbuhan ekspor relatif stabil sedangkan impor menurun," ujar Miranda seperti dikutip harian *Kompas*.

Masih menurut Miranda, kecenderungan harga minyak dunia di tengah tengah keterbatasan produksi minyak mentah di dalam negeri serta terbatasnya sumber penerimaan pemerintah untuk menurunkan subsidi bahan bakar minyak /BBM akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan harga minyak pada masa datang. "Peningkatan harga BBM akan mendorong peningkatan laju inflasi dan pada lanjutannya akan meningkatkan risiko usaha. Dari sisi moneter, peningkatan laju inflasi akan mendorong BI untuk melakukan respon pengetatan kebijakan moneter jika ekspektasi masyarakat meningkat," papar Miranda.

Bahkan ekonom Indonesia di Universitas Teknologi Queensland, Australia, Muhammad Handry Imansyah mengatakan naiknya harga minyak dunia yang nyaris mencapai US\$100 per barrel dapat memicu krisis keuangan di Indonesia. "Untuk itu, pemerintah Indonesia harus mempersiapkan skenario terburuk dan membuat kebijakan 'pre-emptive', sehingga risiko terjadinya krisis keuangan yang sudah di depan mata bisa berkurang," papar Handry kepada kantor berita *Antara*.

Pengamat industri peminyakan Indonesia, Dr. Kurtubi berpendapat serupa. Ia bahkan memperkirakan harga minyak dunia US\$100 dolar per barrel tampaknya tinggal menghitung hari. Jika itu terjadi, pengaruhnya kepada Indonesia sangat tergantung pada volume produksi. Padahal kita sama-sama tahu, pada tahun-tahun terakhir produksi minyak domestik turun terus, sasaran APBN tidak pernah tercapai. "Jadi secara aktual produksi minyak mentah itu tidak pernah tercapai dengan sasaran yang ada. "Sekarang dengan produksi yang hanya 950.000 barrel per hari, menurut hitungan kami itu akan memicu tambahan defisit APBN. Ini karena kenaikan penerimaan sektor migas yang dipicu kenaikan harga minyak dunia tidak bisa menutupi membengkaknya sisi pengeluaran, terutama yang disebabkan oleh meningkatnya subsidi BBM," ungkapnya.

Dengan kata lain, timpal Ketua Umum Kadin

Indonesia M.S. Hidayat, harga minyak mentah dunia justru akan memukul APBN, karena ketergantungan impor minyak mentah di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut Hidayat, produksi minyak mentah Indonesia masih di bawah satu juta barel per tahun, sedangkan kebutuhan mencapai lebih dari 1,4 juta barel, sehingga membutuhkan dana impor yang cukup besar. "Meskipun harus beralih ke sumber energi lain, itu butuh waktu. Saya perkirakan, kita akan menderita dalam setahun ke depan kalau harga minyak mentah masih tinggi, sambil menunggu kesiapan energi alternatif," paparnya.

pertama (*first round effect*) lonjakan harga minyak. Pemerintah, lanjutnya, justru mewaspadai dampak lanjutan (*second round effect*) kenaikan harga minyak terhadap pelemahan ekonomi global dan nasional.

Seperti diakui Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, dalam jangka pendek kenaikan harga minyak dunia memang akan meningkatkan (surplus) neraca pembayaran, mendorong investasi di sektor peminyakan, dan mendorong peningkatan komoditas yang terkait dengan minyak seperti kelapa sawit, karet maupun jagung. Selain itu transaksi berjalan (*current account*) maupun *capital account*



Namun pemerintah sendiri, kendati tetap mewaspadai kenaikan harga minyak dunia, tampaknya berusaha tetap tenang. Paling tidak, sikap itulah yang ditunjukkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Tidak perlu bingung dengan kenaikan harga minyak yang terjadi akhir-akhir ini, karena tambahan pengeluaran juga akan diikuti dengan tambahan penerimaan dari migas,"

Menurut Sri Mulyani, perbedaan estimasi awal harga minyak di APBN 2007 dan 2008 yang adalah sebesar US\$60 per barrel dengan harga dunia yang mendekati US\$100 saat ini bukan merupakan masalah serius. Alasannya, pergerakan harga minyak ini juga akan mendorong penerimaan pemerintah. Artinya, APBN akan tetap aman dari dampak

akan mengalami surplus sehingga akan menambah cadangan devisa nasional. Namun, lanjutnya, dilihat dari sisi negatifnya harus memperhatikan laju inflasi impor (*imported inflation*) yang fluktuasinya dipengaruhi oleh besar dan lamanya kenaikan harga minyak dunia berlangsung. Selain itu, *imported inflation* yang diintegrasikan dengan arus dana masuk (*inflow*) akan mempengaruhi nilai tukar rupiah. "Ini yang perlu dicermati terus. Sejauh mana apresiasi nilai tukar harus tetap dipikirkan. Sebab, apresiasi nilai tukar rupiah dalam jangka pendek akan mengganggu daya saing," tegasnya.

Karena itu, kata Burhanuddin, dalam jangka panjang harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas maupun efisiensi, sehingga



daya saing tetap bisa dipertahankan dan juga memberi kontribusi pada *current account* yang pada akhirnya akan menambah cadangan devisa nasional.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom menambahkan, kenaikan harga minyak di atas US\$100 per barel sudah lama diprediksi pengamat di luar negeri. Bank Indonesia, lanjut dia, sudah banyak melakukan perhitungan tapi masih harus memastikan berbagai perkembangan yang ada. "Jika terjadi keadaan yang paling dikhawatirkan, tentunya BI tidak bisa mengatasinya sendiri, tapi harus saling bersinergi dengan pihak terkait. Dari sisi budget dan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) memang bagus buat kita, tapi yang perlu dijaga adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi," katanya.

Secara umum, Menko Perekonomian Boediono memperkirakan kondisi perekonomian tahun 2007 masih bisa dikelola dengan baik jika harga minyak masih dalam *range* yang sekarang. Toh untuk tahun 2008 ia tak mau berandai-andai. "Kita akan melihat perkembangan harga minyak dan ekonomi global. Kita tetap optimis tingkat pertumbuhan ekonomi tahun ini masih bisa dicapai. Tahun depan barangkali ekonomi global tidak turun terlalu parah, dan angka yang kita inginkan 6,8%. Itu masih bisa kita capai. Kalau tidak, artinya ekonomi global itu turun lebih dari yang kita perkirakan. Pastinya nanti ada dampak pada pertumbuhan ekonomi kita. Intinya kita akan tetap mewaspadai dan APBN merupakan jangkar kestabilan ekonomi dari setiap negara. Karena itu kita akan mengamankan situasi APBN tahun ini maupun tahun depan," papar Boediono.

Menanggapi kekhawatiran berbagai pihak, Boediono menegaskan langkah yang bisa diambil pemerintah adalah memastikan agar APBN tetap aman meskipun harga minyak mencapai level US\$100 per barel. Pemerintah Indonesia, lanjutnya, telah menghimpun sejumlah langkah. "Langkah pertama adalah mengalokasikan dana Rp 7 triliun sebagai pos cadangan umum. Yang kedua, meningkatkan kontribusi BUMN yang diperkirakan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga minyak dan gas berupa setoran dividen. Dan ketiga, memaksimalkan pungutan ekspor dari komoditas yang mengalami kenaikan nilai ekspornya terutama minyak sawit mentah, karet dan produk tambang," ungkap Boediono seperti dikutip *Kompas*.

Lalu, apakah ketenangan pemerintah ini cukup beralasan? Kurtubi, pengamat industri perminyakan ternyata punya pendapat lain.

"Betul, asumsi menteri keuangan itu berdasarkan asumsi kalau produksi minyak mentah adalah satu juta barel per hari atau di atas satu juta barel per hari. Tapi kalau melihat fakta bahwa produksi minyak mentah kita aktualnya tidak bisa mencapai seperti yang dianggarkan di APBN, itu akan sangat berbahaya. Dengan penurunan produksi katakanlah 50 ribu barel per hari saja, itu bisa berdampak pada tambahan defisit APBN paling tidak Rp10 triliun."

Di sisi lain, untuk menaikkan produksi minyak mentah nasional, menurut Kurtubi, bukan merupakan hal yang mudah karena butuh proses panjang. Padahal, data produksi minyak nasional selama tujuh tahun terakhir menunjukkan tidak ditemukan cadangan minyak baru di Indonesia, sehingga produksi minyak nasional hanya bergantung pada sejumlah sumber yang produksinya terus menurun.

Antisipasi yang bisa dilakukan, lanjut Kurtubi, salah satunya adalah mengurangi biaya. Ini karena biaya yang dibayar negara dalam produksi minyak mentah ini terus meningkat, padahal produksi semakin menurun. "Nah kalau pemerintah bisa menekan *cost recovery*, itu akan banyak membantu, terlebih auditor negara seperti BPK menemukan dalam audinya bahwa ada potensi kerugian yang menyangkut *cost recovery* dalam BP Migas yang jumlahnya hampir US\$2 miliar. Kalau pemerintah bisa menghemat *cost recovery*, ini akan sangat bagus."

Cara kedua, masih kata Kurtubi, adalah mengurangi konsumsi BBM dengan kebijakan yang salah satunya adalah konversi minyak tanah ke LPG. Ini perlu dipercepat, termasuk juga kontrol terhadap konsumsi BBM dalam negeri agar volume pemakaian BBM bisa ditekan. Intinya, pemerintah harus mendorong kalangan industri untuk mengonversi pemakaian energi yang mereka pakai selama ini, dari BBM misalnya ke batubara. "Pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur batubara dan sebagainya, sehingga pemakaian BBM untuk industri itu bisa bergeser ke nonminyak bumi."

Soal lain yang amat perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini, lanjut Kurtubi, adalah memastikan tidak adanya penyelewengan BBM akibat terlalu tingginya perbedaan harga BBM bersubsidi dengan BBM nonsubsidi. "Kenaikan harga minyak dunia masih akan terjadi, bahkan angka US\$100 per barel mungkin tercapai. Jika terjadi, dipastikan akan mempengaruhi subsidi BBM. Upaya pemerintah menaikkan produksi minyak hingga 1,034 juta barel per hari pada 2008 nanti belum lah

cukup. Paling tidak produksi minyak harus meningkat hingga 1,450 juta barel per hari," tandasnya.

Agak berbeda dengan Kurtubi, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ahmad Ma'ruf justru mengkhawatirkan dampak kenaikan harga minyak di pasar internasional juga akan merambah ranah politik, jika tidak bisa dibendung. "Kalau sudah merambah ranah politik, itu berarti terjadi krisis yang benar-benar berat," katanya. "Harus ada upaya mencegah politisasi kenaikan harga minyak dunia, apalagi Indonesia merupakan negara yang rentan dengan gejolak ekonomi dan politik. Berbeda dengan negara lain, seperti Singapura dan Malaysia, yang dari sisi finansial cukup kuat."

Jika meningkatnya harga minyak dunia mempengaruhi APBN, lanjut Ma'ruf, maka pemerintah menghadapi situasi dilematis pada 2008. Bagi masyarakat luas, kenaikan harga minyak ini menyebabkan membengkaknya anggaran pemerintah untuk subsidi BBM dalam negeri, apalagi pemerintah sudah berjanji bahwa hingga 2009 tidak akan ada kenaikan harga BBM untuk masyarakat umum. "Ini implikasinya akan serius, karena ada dua hal. Pertama, di tahun 2008 pemerintah sudah berjanji akan menaikkan gaji PNS. Nah ketika kenaikan ini dipaksakan, sementara subsidi membesar, maka implikasi nyata adalah dana untuk publik yang sedianya akan dipakai untuk pembangunan dalam bentuk pelayanan misalnya edukasi, kesehatan dan lain sebagainya, pasti akan terkoreksi. Itu implikasi langsungnya. Yang kedua, tahun 2008 mendatang adalah momentum yang sangat susah untuk melakukan pembangunan karena kondisinya sudah sangat dipengaruhi oleh tarik menarik menjelang Pemilu Presiden 2009. Jika itu dibiarkan, maka isu BBM akan menjadi isu yang 'murah meriah' dan bisa memberikan citra kredibel tidaknya rezim yang berkuasa."

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Negara PPN/Kepala Bapennas Paskah Suzetta mengatakan pemerintah tidak mungkin menaikkan harga BBM bersubsidi, meskipun subsidi BBM pada akhir 2007 diperkirakan bakal mencapai angka Rp 90 triliun atau naik sekitar 40% dari target APBNP sekitar Rp55 triliun. "Pemerintah tidak mungkin menaikkan harga BBM. Namun yang akan dilakukan adalah membatasi penggunaan BBM bersubsidi," papar Paskah seperti yang dikutip kantor berita *Antara*.

Ah, benar-benar bak menepuk minyak di dalam drum...

[yusran]